

MENGUNGKIT INVESTASI SEKTOR PERTANIAN *(Leveraging Investment on Agriculture)*



Staf Ahli Menteri
Bidang Investasi Pertanian



KEMENTERIAN PERTANIAN

MENGUNGKIT INVESTASI SEKTOR PERTANIAN (Leveraging Investment on Agriculture)



**Staf Ahli Menteri
Bidang Investasi Pertanian**



KEMENTERIAN PERTANIAN



MENGUNGKIT INVESTASI SEKTOR PERTANIAN

(Leveraging Investment on Agriculture)

I. PENDAHULUAN

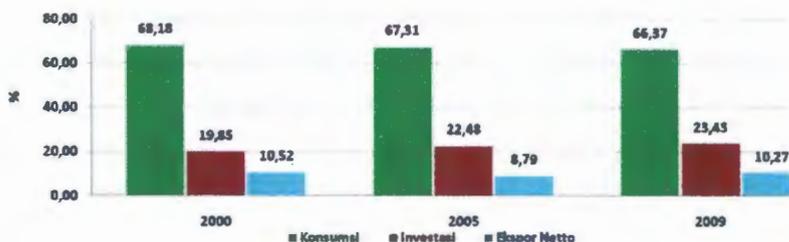
Bank Dunia dalam laporan pembangunannya tahun 2008 (*World Development Report 2008*) memberi judul “*Agriculture for Development*” untuk menggarisbawahi peran vital sektor pertanian sebagai motor penggerak pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan millenium (*Millennium Development Goals*), yang salah satunya bertujuan mengurangi setengah dari jumlah penduduk miskin dan mengalami kelaparan pada tahun 2015. Berdasarkan fakta, tiga dari empat penduduk miskin negara berkembang tinggal di pedesaan, dan mayoritas secara langsung dan tidak langsung tergantung pada sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Peran vital sektor pertanian dalam proses pembangunan di Indonesia disadari oleh pemerintah Indonesia, tercermin melalui strategi pembangunan yang dikenal sebagai *triple track strategy*, yaitu *pro-growth*, *pro-job*, dan *pro-poor*. *Track* pertama dilaksanakan melalui peningkatan ekspor dan investasi. *Track* kedua dilakukan dengan menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan *track* ketiga dilakukan dengan merevitalisasi pertanian, kehutanan, dan perikanan serta ekonomi pedesaan untuk mengurangi kemiskinan. Dalam rangka mensukseskan strategi *triple track* tersebut, variabel ekonomi yang cukup vital adalah investasi. Investasi tidak saja penting terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang (*pro growth*), namun juga merupakan elemen vital untuk menggerakkan sektor riil terutama di pedesaan dalam rangka menciptakan lapangan kerja (*pro-job*) serta meningkatkan produktivitas dan mengurangi kemiskinan (*pro-poor*). Dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menurut penggunaan selama kurun waktu tahun 2000-2009, terlihat bahwa porsi investasi telah semakin membesar dalam penggunaan PDB Indonesia.



Pada tahun 2000 porsi investasi hanya sebesar 19,85%, dan pada tahun 2009 porsinya telah meningkat menjadi 23,43% (Gambar 1).

Gambar 1. Struktur PDB Indonesia Menurut Pengeluaran (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

II. PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL (INVESTASI)¹ PERTANIAN DI INDONESIA TAHUN 2005-2009

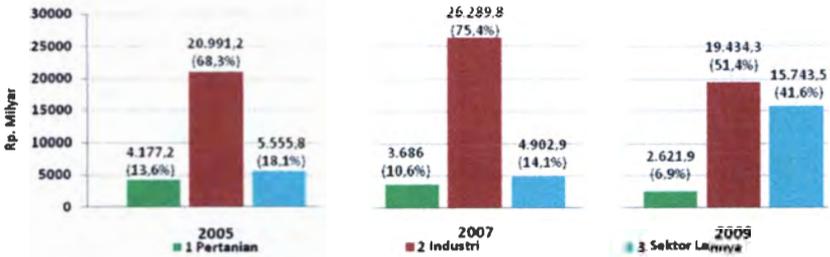
2.1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Selama kurun waktu tahun 2005 hingga 2009 realisasi PMDN menunjukkan angka yang berfluktuasi, namun jika dibandingkan antara nilai investasi tahun 2005 dan tahun 2009 menunjukkan adanya tren peningkatan. Jika realisasi investasi pada tahun 2005 sebesar Rp 30.724,2 miliar, maka pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp 37.799,7 miliar atau mengalami kenaikan sekitar 23,03% dalam kurun 5 (lima) tahun. Jika investasi selama kurun waktu 2005-2009 dikelompokkan menjadi 3 kategori besar (pertanian, industri, dan sektor lainnya), terlihat bahwa lebih dari separuh total investasi tersebut ditanamkan pada sektor

¹ Diluar investasi sektor migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, asuransi, sewa guna usaha, pertambangan dalam rangka kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, investasi yang perizinannya dikeluarkan instansi teknis/sector, investasi portofolio (pasar modal) dan investasi rumah tangga.

industri (51,4%-75,4%). Selama periode tersebut, investasi di sektor pertanian justru menurun secara signifikan dari 13,6% pada tahun 2005 menjadi 6,9% pada tahun 2009 (Gambar 2).

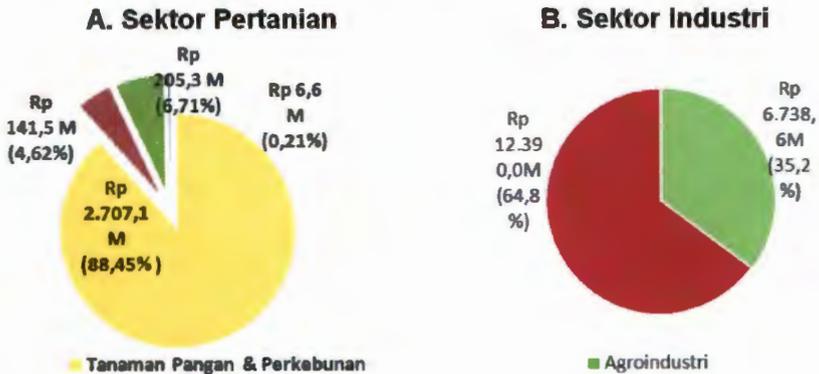
Gambar 2. Perkembangan Realisasi PMDN Menurut Sektor (Rp Milyar)



Jika dikaji rata-rata nilai PMDN di sektor pertanian menurut sub sektor selama kurun waktu tahun 2005-2009, terlihat bahwa PMDN terbesar berada pada sub sektor tanaman pangan dan perkebunan (88,45%), sementara sub sektor lainnya (peternakan, perikanan dan kehutanan) nilai investasinya masih cukup kecil. Besarnya nilai PMDN pada sub sektor tanaman pangan dan perkebunan ini patut diduga didorong oleh PMDN perkebunan. Sementara itu rata-rata PMDN di sektor industri selama kurun waktu tahun 2005-2009 didominasi oleh sub sektor industri lainnya (64,8%). Sub sektor agroindustri (mencakup industri makanan, industri tekstil dan kulit serta industri kayu) pada periode yang sama hanya memperoleh porsi sebesar 35,2% (Gambar 3).



Gambar 3. Rata-Rata Nilai PMDN Di Sektor Pertanian dan Industri Menurut Sub Sektor Tahun 2005-2009 (Rp Milyar)

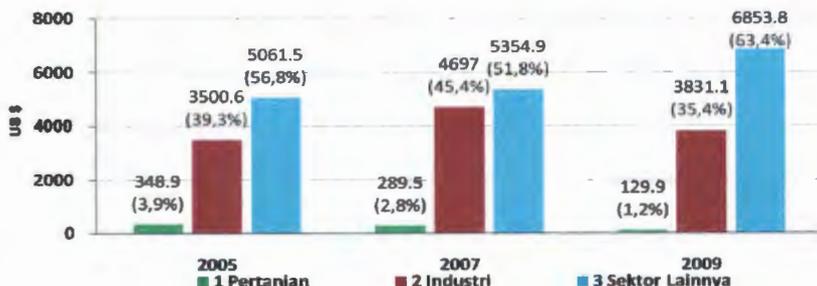


2.2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Selama kurun waktu tahun 2005 hingga 2009 realisasi PMA menunjukkan angka yang berfluktuasi, namun jika dibandingkan antara nilai PMA tahun 2005 dan tahun 2009 menunjukkan adanya trend peningkatan. Jika realisasi PMA pada tahun 2005 sebesar US\$ 8.911,0 juta, maka pada tahun 2009 meningkat menjadi US\$ 10.814,8 juta atau mengalami kenaikan sekitar 21,36% dalam kurun 5 (lima) tahun. Jika PMA selama kurun waktu 2005-2009 dikelompokkan menjadi 3 kategori besar (pertanian, industri, dan sektor lainnya), terlihat bahwa lebih dari separuh total investasi tersebut ditanamkan pada sektor ekonomi lainnya (51,8%-63,4%). **PMA di sektor pertanian selain proporsinya paling rendah juga mengalami penurunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dari sekitar 3,9% pada tahun 2005 menjadi 1,2% pada tahun 2009. (Gambar 4).**



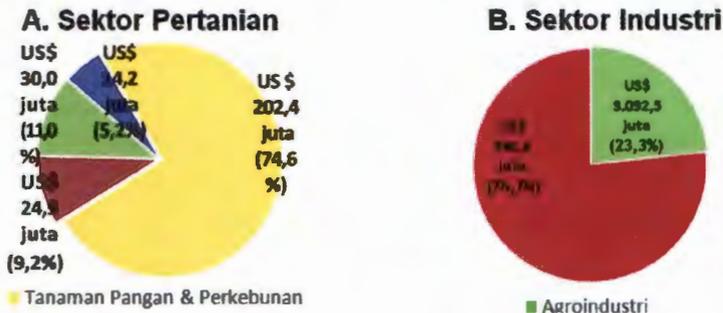
Gambar 4. Perkembangan Realisasi PMA Menurut Sektor (Rp Miliar)



Jika dikaji rata-rata nilai PMA di sektor pertanian menurut sub sektor selama kurun waktu tahun 2005-2009, terlihat bahwa PMA terbesar berada pada sub sektor tanaman pangan dan perkebunan (74,6%) dan didominasi oleh sub sektor perkebunan, sementara sub sektor lainnya (peternakan, perikanan dan kehutanan) nilai investasinya masih sangat kecil. Sementara itu rata-rata PMA di sektor industri selama kurun waktu tahun 2005-2009 didominasi oleh sub sektor industri lainnya (76,7%). Sub sektor agroindustri (industri makanan, industri tekstil dan kulit serta industri kayu) pada periode yang sama hanya memperoleh porsi sebesar 23,3% (Gambar 5).



Gambar 5. Rata-Rata Nilai PMA Di Sektor Pertanian dan Industri Menurut Sub Sektor Tahun 2005-2009 (Rp Milyar)



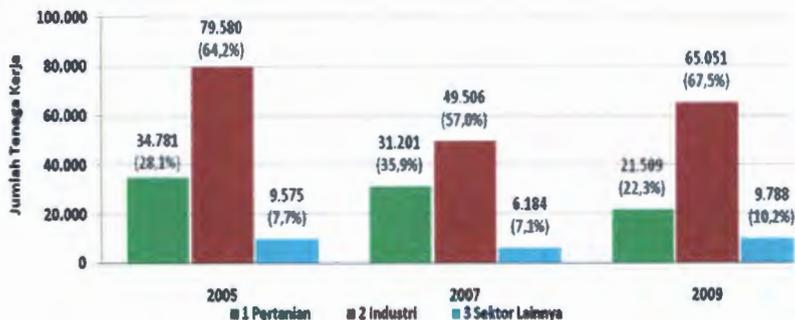
III. PENYERAPAN TENAGA KERJA MELALUI INVESTASI

3.1. Penyerapan Tenaga Kerja PMDN

Selama kurun waktu tahun 2005 hingga 2009 realisasi penyerapan tenaga kerja melalui PMDN menunjukkan angka yang berfluktuasi, namun jika dibandingkan antara nilai investasi tahun 2005 dan tahun 2009 menunjukkan adanya trend penurunan. Jika penyerapan tenaga kerja melalui PMDN pada tahun 2005 sebesar 123.936 tenaga kerja, maka pada tahun 2009 menurun menjadi 96.348 tenaga kerja atau mengalami penurunan sekitar 22,26% dalam kurun 5 (lima) tahun. Jika penyerapan tenaga kerja melalui PMDN selama kurun waktu 2005-2009 dikelompokkan menjadi 3 kategori besar (pertanian, industri, dan sektor lainnya), terlihat bahwa lebih dari separuh penyerapan tenaga kerja tersebut terserap oleh sektor industri (57,0%-67,5%). Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sekitar 22,3%-35,9% selama kurun waktu 2005-2009 (Gambar 6).

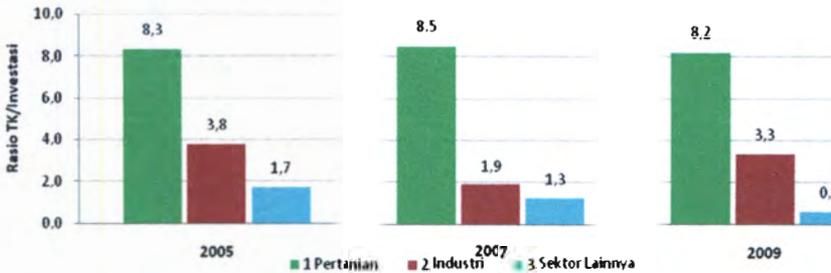


Gambar 6. Penyerapan Tenaga Kerja Melalui PMDN



Lebih lanjut, jika dikaji rasio antara penyerapan tenaga kerja dengan nilai PMDN sektoral, terlihat bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar pada setiap nilai investasi yang ditanamkan dibandingkan sektor ekonomi lainnya. Sebagaimana tersaji pada Gambar 7, setiap Rp 1 milyar PMDN di sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja dengan kisaran 8,2-8,5 tenaga kerja. Rasio ini lebih besar dibandingkan sektor industri yang hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 1,9-3,8 pada setiap Rp 1 milyar investasi di sektor industri. Demikian halnya dengan penyerapan tenaga kerja di sektor ekonomi lainnya yang nilai penyerapan tenaganya lebih kecil dibandingkan sektor pertanian (Gambar 7).

Gambar 7. Rasio Penyerapan Tenaga Kerja dan PMDN



3.2. Penyerapan Tenaga Kerja PMA

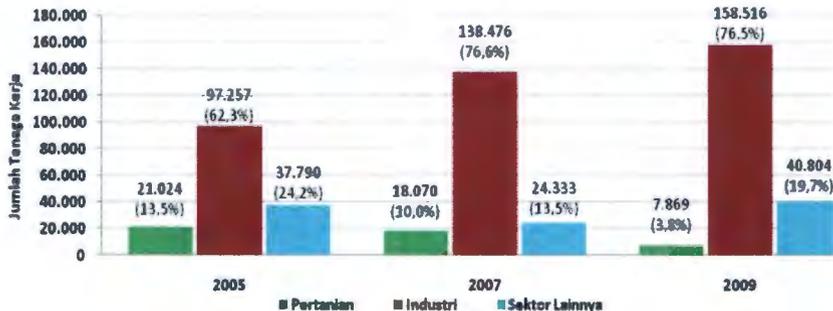
Selama kurun waktu tahun 2005 hingga 2009 realisasi penyerapan tenaga kerja melalui PMA menunjukkan angka yang berfluktuasi, namun jika dibandingkan antara nilai investasi tahun 2005 dan tahun 2009 menunjukkan adanya trend peningkatan. Jika penyerapan tenaga kerja melalui PMA pada tahun 2005 sebesar 156.071 tenaga kerja, maka pada tahun 2009 meningkat menjadi 207.189 tenaga kerja atau mengalami peningkatan sekitar 32,75% dalam kurun 5 (lima) tahun. Jika penyerapan tenaga kerja melalui PMA selama kurun waktu 2005-2009 dikelompokkan menjadi 3 kategori besar (pertanian, industri, dan sektor lainnya), terlihat bahwa lebih dari separuh penyerapan tenaga kerja tersebut terserap oleh sektor industri (62,3%-76,6%). Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sekitar 3,8%-13,5% selama kurun waktu 2005-2009 (Gambar 8).

Jika dikaji rasio antara penyerapan tenaga kerja dengan nilai PMA sektoral, terlihat bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar pada setiap nilai investasi yang ditanamkan dibandingkan sektor ekonomi lainnya. Sebagaimana tersaji pada Gambar 9, setiap 1 juta US\$ PMA di sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja dengan kisaran 60,3-62,4 tenaga kerja. Rasio ini lebih besar dibandingkan sektor industri (27,8-41,4 TK/1 juta US\$ PMA) dan sektor ekonomi lainnya (4,5-7,5 TK/1 juta US\$ PMA) yang nilai

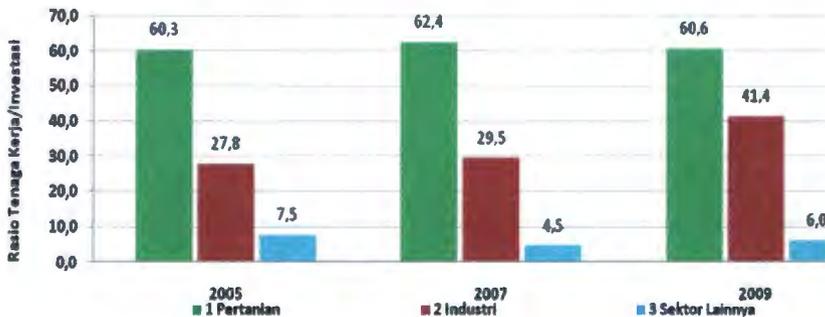


penyerapan tenaga kerjanya lebih kecil dibandingkan sektor pertanian (Gambar 9).

Gambar 8. Penyerapan Tenaga Kerja Melalui PMA



Gambar 9. Rasio Penyerapan Tenaga Kerja dan PMA



IV. FAKTOR-FAKTOR UTAMA PENGHAMBAT INVESTASI DI SEKTOR PERTANIAN

Penurunan investasi di sektor Pertanian baik PMDN maupun PMA selama periode 4 tahun sebelumnya disebabkan oleh beberapa faktor eksternal maupun internal. Namun faktor dominan yang mempengaruhi penurunan investasi tersebut disinyalir kuat disebabkan oleh faktor internal (dalam negeri) yaitu :

1. Birokrasi yang tidak ramah investor (Investor Friendly)
Prosedur yang berbelit, tidak transparan, dan tenggang waktu penyelesaian yang tidak pasti sehingga ekonomi biaya tinggi (pungutan yang tidak resmi).
2. Status lahan yang tidak jelas.
3. Infrastruktur yang kurang mendukung
4. Profil/informasi tentang potensi, peluang, prospek serta prosedur investasi yang ditampilkan oleh Pemerintah kabupaten/Kota dan Propinsi kurang memberikan kepastian (informasi yang ditampilkan cenderung "meaningless") bagi calon investor

Berbagai masukan dari dunia usaha, menyatakan optimisme apabila dilakukan perbaikan secara konsisten terhadap KELIMA aspek tersebut di atas, akan menjadi pengungkit percepatan mengalirnya investasi di sektor pertanian di wilayah.



CONTOH PELAYANAN SATU PINTU DI KABUPATEN SRAGEN

(kabupaten penerima award BKPM 2009 dan 2010)

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta menyongsong era globalisasi pemerintah kabupaten sragen, Propinsi Jawa Tengah meningkatkan kemampuan bersaing dengan menciptakan iklim usaha dan investasi yang sehat. Dalam kaitan itu, pada tahun 2002 dibentuk pelayanan Terpadu (UPT) dan kemudian ditetapkan dengan Perda Kabupaten Sragen No 15 tahun 2003 dalam bentuk kantor pelayanan Terpadu.

Jenis pelayanan yang diberikan oleh KPT kepada masarakat terdiri dari pelayanan perizinan (seperti izin usaha, izin prinsip, izin mendirikan bangunan) yang merupakan pelayanan satu pintu dan pelayanan non perizinan (seperti penerbitan KTP dan Kartu Keluarga) yang merupakan pelayanan saatu atap, yang prosesnya masih di lakukan dinas atau instansi yang bersangkutan.

Jenis pelayanan perizinan yang diberikan oleh KPT Kabupaten Sragen berjumlah 52 buah dengan waktu penyelesaian berkisar antara 5-15 hari kerja. Sebagai contoh, untuk memperoleh ijin prinsip dan ijin lokasi hanaya dibutuhkan waktu 12 hari kerja. Sedangkan untuk memperoleh ijin usaha industry dibutuhkan waktu 7 hari kerja.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPT selalu berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait, serta selain itu telah dibentuk pula Tim Pembina UPT yang anggotanya terdiri dari Kepala Dinas Instansi terkait sehingga Dinas Teknis ikut bertanggung jawab atas kelancaran pemberian pelayanan perijinan.

Kelebihan KPT Kabupaten Sragen adalah kecepatannya dalam memberi pelayanan perijinan. Pertama adalah adanya jadwal yang jelas dari setiap proses yang diperlukan untuk mnyelesaikan perijinan dan jadwal tersebut juga disampaikan kepada pengaju permohonan pada hari pertama pengajuan perijinan. Kedua adalah kecepatan KPT di dalam memenuhi jadwal dari masing2 proses perijinan. Ketiga adalah system monitoring (secara elektronik) dan pengendalian yang ketat terhadap keseluruhan proses perijinan.

Beberapa jenis pelayanan yang diberikan oleh KPT Kabupaten Sragen berikut maksimum penyelesaian perijinan adalah sebagai berikut: (a). Ijin Prinsip (12 hari kerja); (b). Ijin Lokasi (12 hari kerja); (c). Ijin Mendirikan Bangunan (15 hari kerja); (d). Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (5 hari kerja); (e). Ijin Usaha Industri (IUI) (7 hari kerja); (f). Ijin Usaha Angkutan (12 hari kerja); (g). Ijin Usaha Jasa Konstruksi (12 hari kerja).



V. PROFIL PELUANG INVESTASI SEKTOR PERTANIAN

Banyak strategi yang dapat dijadikan sebagai pengungkit di sektor pertanian, diantaranya ketersediaan profil peluang investasi komprehensif yang mampu memberikan kepastian dan keyakinan bagi calon investor. Dalam hal ini, langkah-langka praktis penyusunan profil peluang investasi di sektor pertanian dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Tetapkan 1 atau 2 bidang usaha yang menjadi prioritas berdasarkan keunggulan komparatif wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi dan keunggulan kompetitif (kekuatan daya dan prospek pasar). Termasuk dalam bidang usaha di sector pertanian adalah (1) perbenihan/perbibitan; (2) Budidaya; dan (3) Pascapanen dan industri olahan.
2. Tetapkan 1 sampai 2 subsektor dan selanjutnya dalam lingkup subsector tersebut tetapkan 1 sampai 3 komoditas prioritas yang ditetapkan berdasarkan pada hasil analisa keunggulan komparatif kabupaten/kota/provinsi dan keunggulan kompetitif (kekuatan daya saing dan prospek pasar). Termasuk dalam subsektor lingkup pertanian adalah : (1) Tanaman Pangan (komoditasnya antara lain padi, jagung, kedele, cassava dan lain-lain); (2) Hortikultura (komoditas yang termasuk dalam subsector hortikultura diantaranya buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan biofarmaka); (3) Perkebunan, komoditas yang termasuk dalam subsector perkebunan diantaranya kopi, the, karet, kakao dan lain-lain; dan (4) Peternakan, diantaranya sapi, ayam, kambing dan lain-lain.



Adapun yang termasuk kelompok bidang penanganan pasca panen dan industry pengolahan, diantaranya (1) sortasi, grading, pencucian, pendinginan, dan pengemasan; (2) penggilingan padi, pengolahan jagung untuk pakan ternak, pengolahan pangan; (3) pengolahan sawit, kakao, karet, tebu, teh, mete; (4) pengolahan buah segar (selai, jus, buah kaleng dan lain-lain); dan (5) rumah potong ternak besar, unggas, babi, industry pengolahan daging segar, industry pakan ternak dan lain-lain.

3. Susun profil investasi Kabupaten/Kota/Provinsi dengan melengkapi informasi pada "Dummy" Profil Peluang Investasi Sektor Pertanian Kabupaten/Kota/provinsi sebagaimana terlampir.



“DUMMY”

PROFIL PELUANG INVESTASI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN/KOTA/PROPINSI...



STAF AHLI MENTERI BIDANG INVESTASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

ZONA/WILAYAH PETERNAKAN/PERKEBUNAN/HORTIKULTURA/ TANAMAN PANGAN/AGRIBISNIS TERPADU :

POTENSI

- Letak : Kecamatan.....
- Rencana alokasi :(Ha) (.... Ha di desa...,Ha di desa...)
- Topografi : datar, berbukit
- Status tanah : hak milik, HGU, Ulayat,.....
- Akses Jalan : mudah/sulit, dilalui jalan..., dilalui rel..., akses langsung ke jalan.....
- Kondisi jalan : baik, jelek, akses langsung ke jalan kolektor....
- Lebar jalan : meter
- Jaringan listrik : tersedia (yang terpakai....., yang tersisa.....)
- Sumber air minum : tersedia (PDAM, rata-rata kedalaman sumur penduduk)
- Drainase : baik/jelek.
- Tenaga kerja : tersedia (laki-laki, perempuan....., usia tenaga kerja produktif)
- Jarak ke kota : ±km dari kota.....
- Kondisi eksisting : Zona Industri masih kosong berupa lahan kering. Kawasan Industri telah terisi ±... Ha untuk industri dari... Ha areal yang direncanakan.
- Lain-lain : Kawasan sebagian dikelola oleh PT.....



SAM BIDANG INVESTASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN RI

**ZONA/WILAYAH PETERNAKAN/PERKEBUNAN/HORTIKULTURA/
TANAMAN PANGAN/AGRIBISNIS TERPADU :**

POTENSI

- Letak : Kecamatan.....
- Rencana alokasi :(Ha) (... Ha di desa...,Ha di desa...)
- Topografi : datar, berbukit
- Status tanah : hak milik, HGU, Ulayat,.....berupa sawah
- Akses Jalan : mudah/sulit, menuju jalan arteri primer..... Dekat akses menuju rencana jalan tol
- Kondisi jalan : Baik/jelek, jalan lokal ruas.....
- Lebar jalan : meter
- Jaringan listrik : tersedia (yang terpakai... , yang tersisa.....), Gardu Induk.....
- Sumber air minum : tersedia (PDAM, rata-rata kedalaman sumur penduduk)
- Drainase : baik/jelek
- Tenaga kerja : tersedia (laki-laki, perempuan....., usia tenaga kerja produktif)
- Kondisi eksisting : telah terisi.... Ha oleh PT.dan Ha direncanakan di desa..... Akan dibangun industri Ha dari Ha luas areal yang direncanakan di ...
- Potensi lain : dekat dengan aliran sungai-sungai kecil

**ZONA/WILAYAH PETERNAKAN/PERKEBUNAN/HORTIKULTURA/
TANAMAN PANGAN/AGRIBISNIS TERPADU :**

POTENSI

- Letak : Kecamatan.....
- Rencana alokasi :(Ha)
- Topografi : datar, berbukit
- Status tanah : hak milik, HGU, Ulayat,....., berupa lahan kering
- Akses Jalan : mudah/sulit, dilalui jalan....., dilalui rel....., akses langsung ke..... jalan.....
- Kondisi jalan : Baik, jelek, merupakan jalan kolektor.....
- Lebar jalan : meter
- Jaringan listrik : tersedia (yang terpakai..... , yang tersisa), (Gardu Induk), kapasitas
- Sumber air minum : tersedia (PDAM, rata-rata kedalaman sumur penduduk)
- Drainase : baik/jelek
- Tenaga kerja : tersedia (laki-laki, perempuan....., usia tenaga kerja produktif)
- Kondisi eksisting : belum terisi

